



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I  
2018

**Penyusun:**

Penanggung Jawab: Kepala Kanwil DJPb Prov. Riau | Ketua Tim:  
Kepala Bidang PPA II | Editor: Solikhin, Henjang Prasetiawan |  
Desain Grafis: Solikhin | Anggota: Jumihardi | Nurmiati | Ermaini |  
Tsani Rozak Budiarto | Lely Anita

**KANWIL DJTJEN**  
**PERBENDAHARAAN**  
**Provinsi Riau**

## DAFTAR ISI

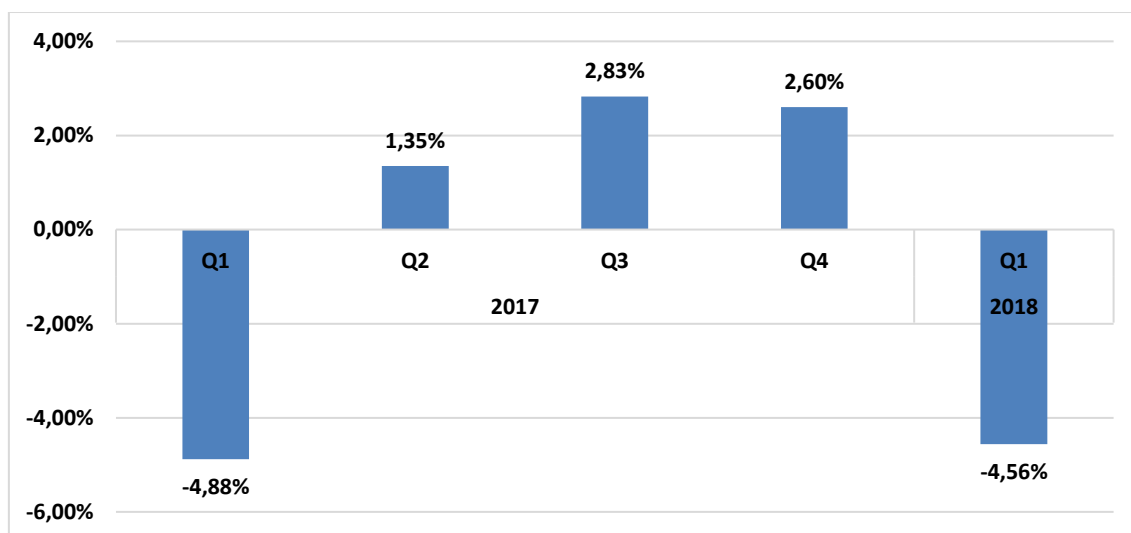
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	2
C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN .....	4
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	9
C. Prognosis Realisasi APBN.....	12
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD .....	13
A. Pendapatan Daerah.....	14
B. Belanja Daerah.....	17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018.....	18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) .....	19
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian .....	19
B. Pendapatan Konsolidasian .....	19
C. Belanja Konsolidasian .....	21
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB .....	23
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	25
A. Sektor Pariwisata Primadona Baru Riau .....	25
B. Riau di atas Minyak di bawah Minyak Tetapi Harga Minyak Mahal .....	25

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD maupun alokasi dana APBN di daerah merupakan salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di samping konsumsi dan investasi. Pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau tahun 2017 dan 2018 disajikan dalam grafik berikut ini.

**Grafik Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau per Triwulan Tahun 2017 dan 2018 (*q-to-q*)**



Sumber: BPS Provinsi Riau

PDRB Provinsi Riau triwulan I tahun 2018 merupakan PDRB terbesar di pulau Sumatera, mencapai Rp179,86 triliun atau Rp27,02 juta perkapita dan memberikan kontribusi 23,19% dari total PDRB di Sumatera, diikuti oleh PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp177,62 triliun (22,90%). Penyumbang terbesar PDRB Provinsi Riau adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian (26,84%), diikuti oleh industri pengolahan (24,71%) dan pertanian, kehutanan dan perikanan (23,67%).

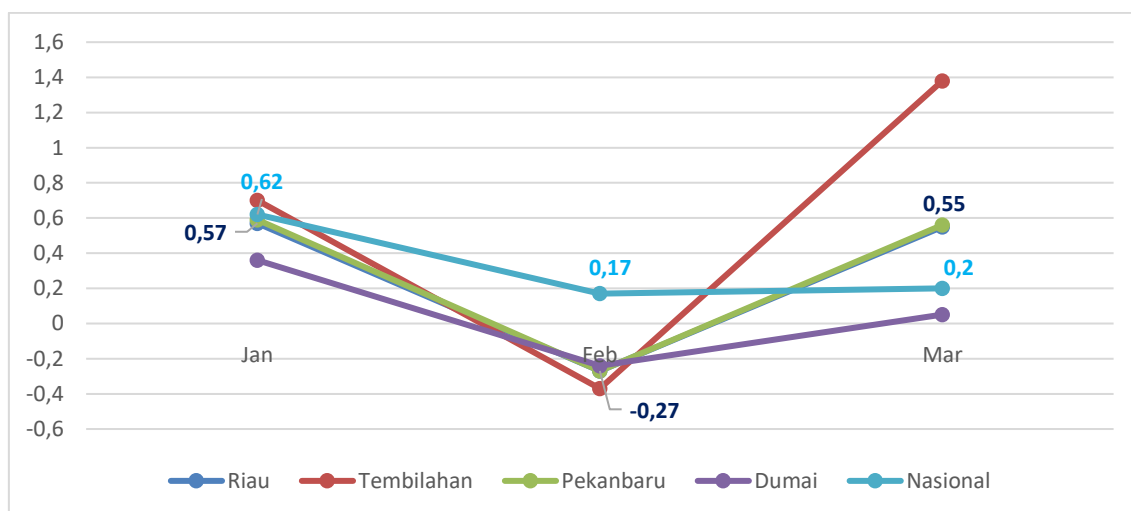
Perekonomian Riau yang diukur berdasarkan PDRB turun sebesar Rp5,21 triliun atau mengalami kontraksi sebesar minus 4,56% terhadap triwulan IV 2017 (*q-to-q*). Penurunan tersebut disebabkan karena terjadi reduksi pada sektor pertanian (minus 4,26%) akibat siklus musiman dan reduksi pada beberapa sektor yang berkontribusi besar, di antaranya sektor pertambangan dan penggalian (minus 2,60%) dan konstruksi (minus 7,92%).

Ekonomi Riau secara tahunan tumbuh 2,91% (*y-on-y*), meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar 2,84%. Hal ini sejalan dengan perekonomian nasional dan regional Sumatera yang tumbuh lebih cepat, yaitu masing-masing dari 4,05% dan 5,01% pada triwulan I tahun 2017 menjadi 4,37% dan 5,06% pada triwulan I tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Riau secara regional Sumatera berada di posisi kedua terbawah setelah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,46%.

## B. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Inflasi merupakan variabel penting dalam penyusunan kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN dan APBD, serta pengaruhnya terhadap realisasi anggaran pemerintah di daerah.

**Grafik Tingkat Inflasi Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2018**



Sumber: BPS Provinsi Riau

Inflasi bulanan (*m-to-m*) di Provinsi Riau berada pada level fluktuatif, dengan deflasi sebesar 0,27% pada bulan Februari 2018. Inflasi bulanan pada akhir triwulan I tahun 2018 di Provinsi Riau mencapai 0,55%, jauh di atas inflasi nasional sebesar 0,20%. Penyumbang terbesar penyebab inflasi yang tinggi pada bulan Maret 2018 adalah kenaikan pada harga kelompok bahan makanan, sandang, dan kelompok makanan jadi serta tembakau. Patut diduga bahwa kenaikan harga komoditi pada kelompok bahan makanan tersebut dikarenakan terganggunya jalur distribusi bahan makanan yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat karena bencana alam yang terjadi pada bulan Maret lalu, mengingat hampir sebagian besar bahan makanan berupa sayur mayur dan buah buahan dipasok setiap hari dari Provinsi Sumatera Barat.

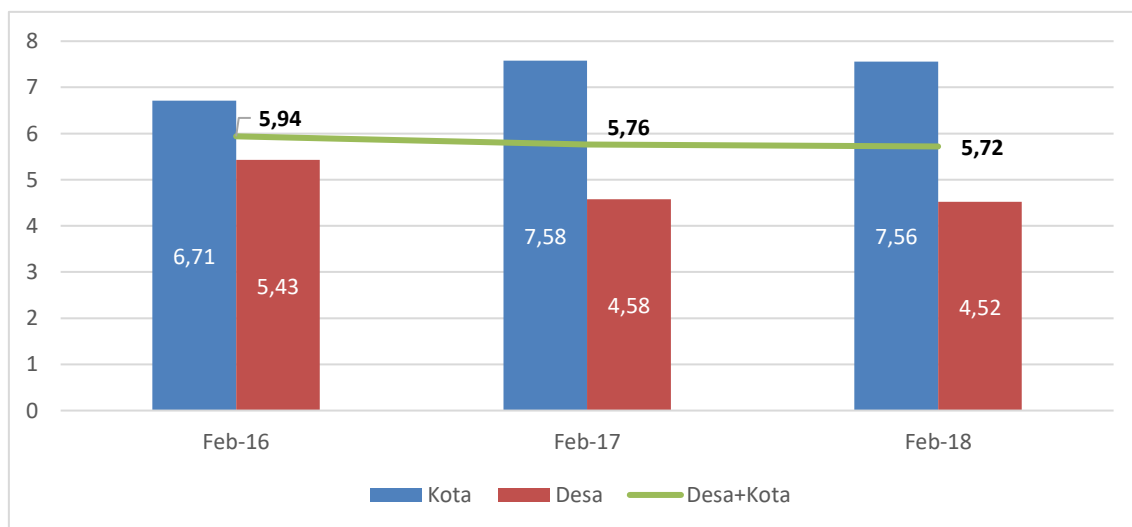
### C. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya penyebaran pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Semakin sejahtera suatu daerah maka semakin sedikit jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau bulan Maret 2017 sebanyak 514,62 ribu orang atau 7,78% dari total penduduk Provinsi Riau. Kemiskinan ini tersebar di Perkotaan (6,79%) dan Pedesaan (8,43%). Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,65%. Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional yang menurun dari 10,86% pada Maret 2016 menjadi 10,70% pada Maret 2017.

Selain itu, terjadi peningkatan Garis Kemiskinan (GK) di Riau dari Rp426.001 per kapita/bulan menjadi Rp456.493 per kapita/bulan. Kenaikan terbesar terjadi di Perkotaan, dari Rp426.346 per kapita/bulan menjadi Rp463.248 per kapita/bulan, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di kota. Kenaikan ini lebih banyak dipengaruhi kenaikan harga komoditas makanan, sehingga kenaikan harga bahan pokok makanan berpengaruh cukup signifikan terhadap kenaikan GK.

Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2018 sebanyak 3,30 juta orang, bertambah 167,86 ribu orang dibandingkan tahun lalu dengan penduduk bekerja sebanyak 3,11 juta orang, bertambah 159,69 ribu orang. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2018 sebanyak 188,41 ribu orang atau 5,72%. TPT di perkotaan sebesar 7,56%, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 4,52%.

**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau 2016-2018**



Sumber: BPS Provinsi Riau

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada tahun 2018 Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar Rp17,95 triliun dan pagu belanja sebesar Rp29,75 triliun. Target ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp18,09 triliun untuk target pendapatan dan Rp36,21 triliun untuk pagu belanja.

**Tabel Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau  
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>18.087</b>	<b>3.168</b>	<b>17.945</b>	<b>2.786</b>
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	18.087	3.168	17.945	2.786
1. Penerimaan Pajak	17.486	2.928	17.311	2.572
2. PNPB	601	240	634	214
II. HIBAH	-	-	-	-
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>36.211</b>	<b>7.294</b>	<b>29.751</b>	<b>5.944</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	6.542	925	8.098	987
1. Belanja Pegawai	2.627	499	2.785	509
2. Belanja Barang	2.676	315	3.300	376
3. Belanja Modal	1.204	109	1.997	101
4. Belanja Bantuan Sosial	36	1	16	0
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	29.669	6.369	21.653	4.957
1. Transfer ke Daerah	28.400	6.369	20.393	4.795
a. Dana Perimbangan	28.377	6.361	20.239	4.750
1) Dana Bagi Hasil	15.948	3.059	7.748	1.492
2) Dana Alokasi Umum	8.095	2.625	8.147	2.792
3) Dana Alokasi Khusus	4.334	677	4.344	466
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	23	8	154	45
2. Dana Desa	1.269	-	1.260	162
<b>SURPLUS DEFISIT</b>	<b>(18.124)</b>	<b>(4.126)</b>	<b>(11.806)</b>	<b>(1.640)</b>

Sumber: SPAN, Kanwil DJP Riau Kepri, Kanwil DJBC Riau

Target pendapatan negara di Provinsi Riau pada tahun 2018 mencapai Rp17,95 triliun, turun Rp1,42 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Target pendapatan tersebut seluruhnya berasal dari penerimaan dalam negeri. Belanja negara tahun 2018 dialokasikan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp29,75 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp8,10 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp21,65 triliun.

## A. Pendapatan Negara

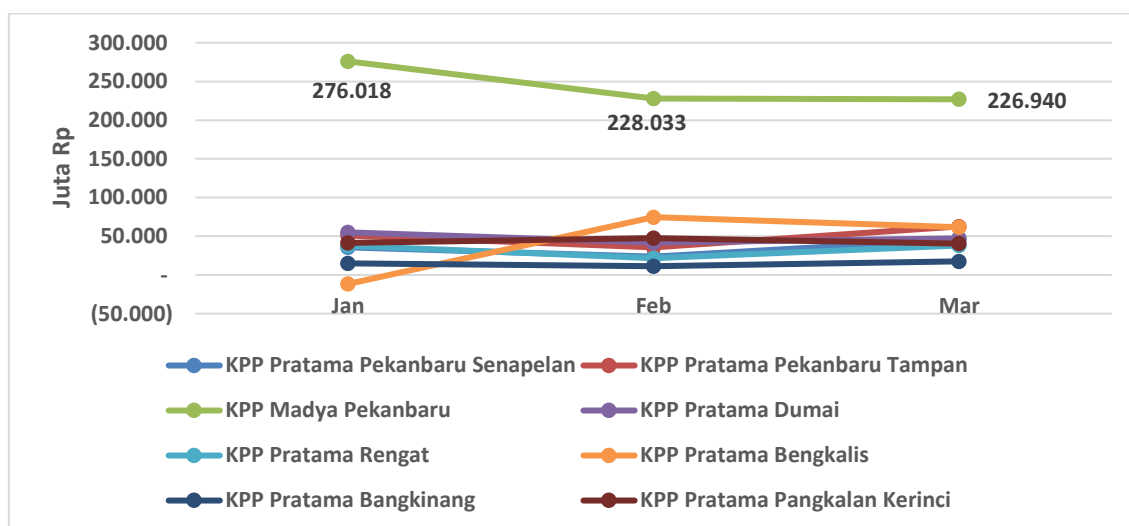
### 1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018, penerimaan perpajakan dapat direalisasikan sebesar Rp2,57 triliun atau 14,86% dari target, yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp2,51 triliun dan pendapatan pajak internasional Rp61,60 miliar. Kontribusi penerimaan perpajakan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPH), mencapai Rp1,52 triliun (58,96%) dan 34,88% di antaranya atau Rp897,38 miliar diperoleh KPP Madya Pekanbaru.

#### a. Pajak Penghasilan (PPH)

Penerimaan PPh di Provinsi Riau sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 menyumbang Rp1,52 triliun atau 58,96% dari total penerimaan perpajakan dan terealisasi 16,18% dari targetnya. Penerimaan ini mengalami penurunan sebesar Rp136,96 miliar dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun 2017.

**Grafik Realisasi Penerimaan PPh per KPP  
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018 (dalam Juta Rp)**



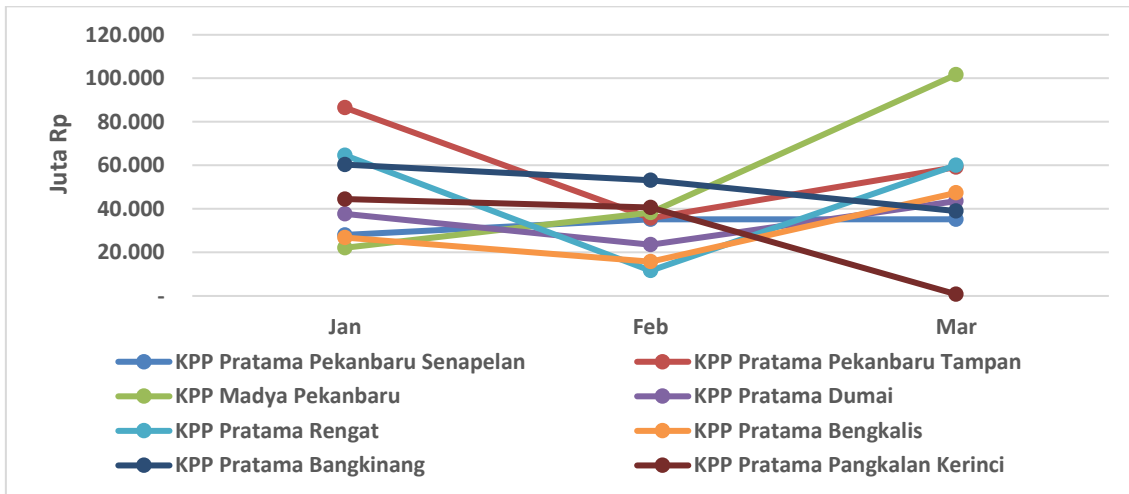
Sumber: Kanwil DJP Riau Kepri (diolah)

Penerimaan PPh sebagian besar berasal dari KPP Madya Pekanbaru dengan total realisasi Rp730,99 miliar atau 47,92%, sedangkan KPP Pratama Bengkalis hanya menyumbang Rp43,86 miliar atau 2,88%. Penerimaan PPh terbanyak terjadi di bulan Maret 2018 sebesar Rp540,88 miliar dan terkecil di bulan Februari Rp484,51 miliar.

#### b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN tercatat Rp974,24 miliar atau 37,87% dari total penerimaan perpajakan dan merupakan penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan PPh. Penerimaan PPN pada periode triwulan I 2018 mengalami penurunan Rp24,64 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Target penerimaan ini berhasil dicapai 16,36%.

**Grafik Realisasi Penerimaan PPN per KPP  
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018 (dalam Juta Rp)**



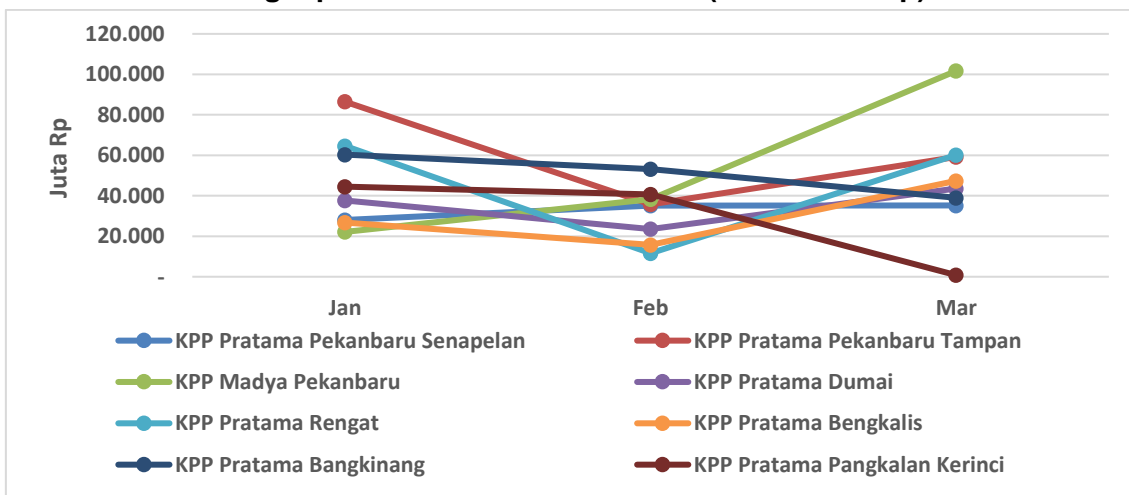
Sumber: Kanwil DJP Riau Kepri (diolah)

Penerimaan PPN tahun 2018 berasal dari delapan KPP yang tersebar di Provinsi Riau dengan capaian tertinggi diraih oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar Rp181,46 miliar (17,94%), diikuti oleh KPP Madya Pekanbaru senilai Rp162,11 miliar atau 16,03% dan KPP Pratama Bangkinang sebesar Rp152,50 miliar atau 15,07% dari total penerimaan. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Maret sebesar Rp386,99 miliar.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPnBM di Provinsi Riau diuraikan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik Realisasi Penerimaan PPnBM per KPP  
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018 (dalam Juta Rp)**



Sumber: Kanwil DJP Riau (diolah)

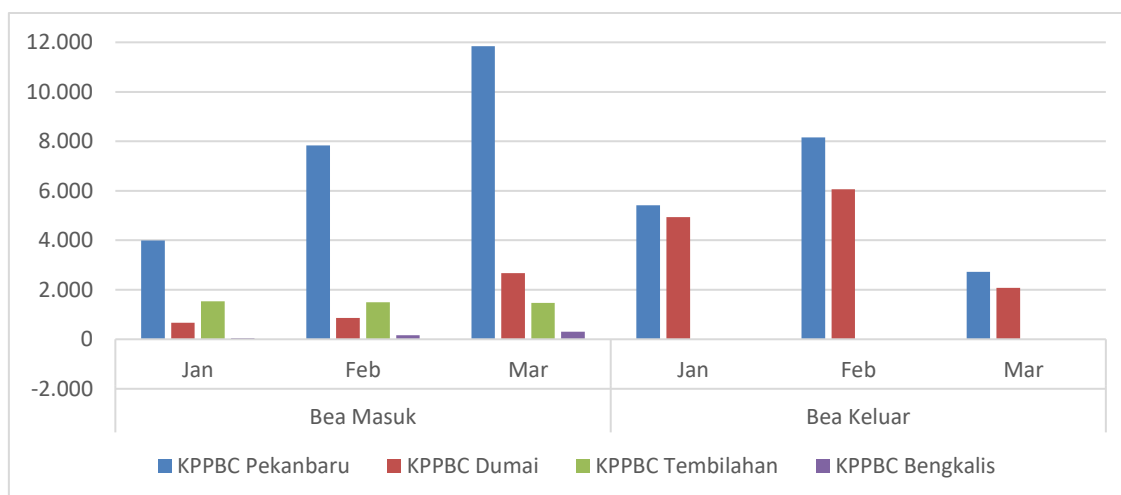
Penerimaan PPnBM terealisasi 10,67% (Rp1,57 miliar) dan hanya berkontribusi 0,20% dari total penerimaan perpajakan, naik Rp643,47 juta dibandingkan triwulan I 2017, sebagian besar berasal dari KPP Madya Pekanbaru sebesar Rp1,53 miliar (97,66%). Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp1,45 miliar.



#### d. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 mencapai Rp61,60 miliar, 23,53% dari target penerimaan, yang terdiri dari penerimaan bea masuk Rp32,88 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp28,72 miliar. Penerimaan pajak ini memberikan kontribusi terhadap total penerimaan perpajakan sebesar 1,12%.

**Grafik Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional per KPPBC  
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018 (dalam Juta Rp)**



Sumber: Kanwil DJBC Riau (diolah)

Penerimaan pajak perdagangan internasional terbesar berada di KPPBC Pekanbaru dengan total penerimaan Rp39,96 miliar, diikuti KPPBC Dumai sebesar Rp17,28 miliar. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Februari senilai Rp24,57 miliar, diikuti penerimaan bulan Maret sebesar Rp21,12 miliar.

Pekanbaru – [beacukai.go.id](http://beacukai.go.id). Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau menandatangani kesepakatan bersama (MoU) atas kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai melalui Kegiatan Analisis Bersama (*Joint Analysis*). Kesepakatan bersama ini dilakukan dalam rangka optimalisasi upaya peningkatan penerimaan negara dan penegakkan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai di lingkup Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

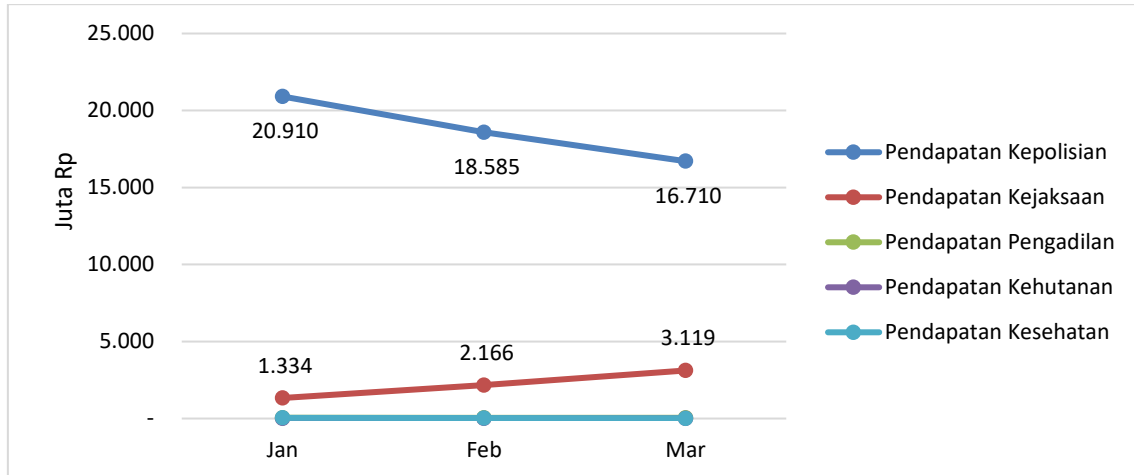
#### 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Riau sampai akhir Maret 2018 berjumlah Rp213,80 miliar dan berkontribusi terhadap pendapatan negara di Provinsi Riau sebesar 7,69%. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp240,41 miliar. Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp114,47 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 99,77 miliar. Pendapatan PNBP Lainnya didominasi oleh pendapatan administrasi dan penegakan hukum dengan realisasi Rp63,07 miliar dan pendapatan jasa sebesar Rp35,54 miliar.

a. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

Penerimaan pendapatan administrasi dan penegakan hukum di Provinsi Riau pada triwulan I 2018 sebesar Rp63,07 miliar atau 29,44% dari total penerimaan PNBPNP.

**Grafik Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018 (dalam Juta Rp)**



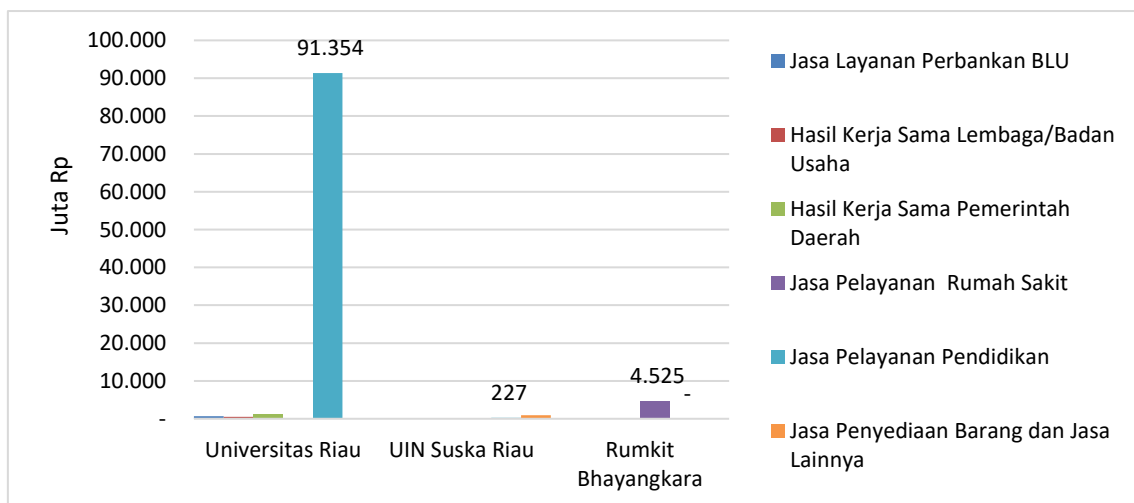
Sumber: SPAN (diolah)

Pendapatan administrasi dan penegakan hukum sebagian besar berasal dari pendapatan kepolisian, seperti pendapatan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan total Rp56,20 miliar. Penerimaan ini tertinggi berada di bulan Januari sebesar Rp22,34 miliar.

b. Pendapatan BLU

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 pendapatan BLU tercatat Rp99,77 miliar. Pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 46,57% dari total PNBPNP.

**Grafik Realisasi Pendapatan BLU per Jenis Pendapatan Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018 (dalam Juta Rp)**



Sumber: SPAN (diolah)

Penerimaan BLU terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi sebesar Rp91,58 miliar yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau. Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp4,53 miliar berasal dari satker Rumkit Bhayangkara Pekanbaru. Realisasi pendapatan BLU triwulan I tahun 2018 terbesar diperoleh Universitas Riau sebesar Rp93,86 miliar, diikuti pendapatan dari UIN Rumkit Bhayangkara sebesar Rp4,53 miliar.

Pekanbaru – *rri.co.id*. Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada triwulan pertama tahun 2018 mengalami peningkatan. Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga minyak dan membaiknya harga komoditas dalam beberapa waktu belakangan. Realisasi PNBP mencapai Rp 70,3 triliun atau 25,5 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebanyak Rp 275,4 triliun atau naik sebesar Rp 31,1 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp 39,2 triliun. "Pemerintah juga memproyeksikan pengelolaan PNBP yang makin optimal dengan perbaikan regulasi melalui revisi undang-undang PNBP yang sekarang masih bergulir di DPR RI," ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto.

### 3. Pendapatan Hibah

Penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBN sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN, baik hibah langsung maupun hibah tidak langsung. Sampai dengan triwulan I 2018 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah di Provinsi Riau.

## B. Belanja Negara

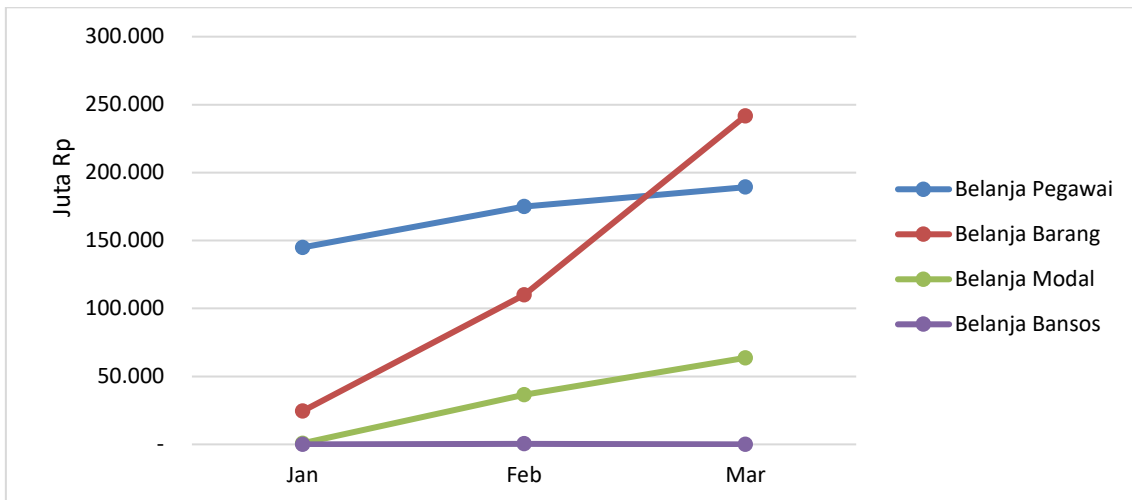
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

### 1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat tahun 2018 yang ada di Provinsi Riau berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial dengan total pagu sebesar Rp8,10 triliun, naik Rp1,56 triliun dibandingkan pagu belanja tahun 2017.

Realisasi belanja sampai dengan triwulan I tahun 2018 tercatat Rp986,82 miliar atau 12,19% dari pagu belanja, yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp509,15 miliar, belanja barang Rp376,22 miliar, belanja modal Rp101,07 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp378 juta. Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Maret senilai Rp494,64 miliar. Total realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan secara nominal dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang terealisasi Rp925 miliar, namun turun secara persentase sebesar 1,95%.

**Grafik Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat  
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018**

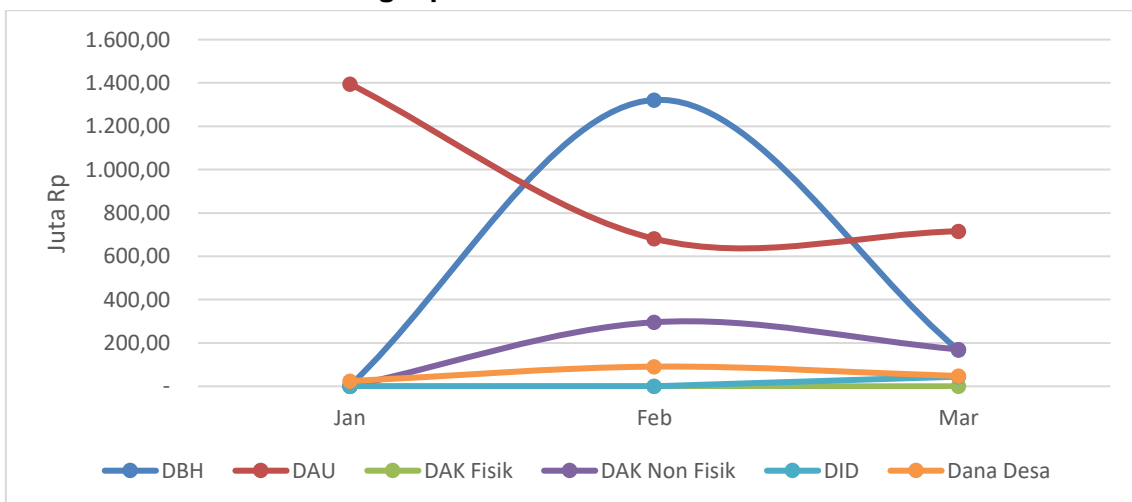


Sumber: SPAN (diolah)

## 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2018 di Provinsi Riau mencapai Rp21,65 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp29,67 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan akhir Maret 2018 sebesar Rp4,96 triliun atau 22,89% dari total pagu. Jumlah ini berada di bawah realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp6,37 triliun.

**Grafik Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa  
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018**



Sumber: Simtrada (diolah)

Realisasi TKDD terbanyak adalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,79 triliun, diikuti transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,49 triliun, sedangkan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum ada penyaluran. Realisasi tertinggi TKDD terjadi di bulan Februari dengan total realisasi sebesar Rp2,39 triliun.

### 3. Pengelolaan BLU

Perkembangan pagu belanja BLU diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau  
Tahun 2017 dan 2018**

Satker BLU	2017				2018			
	RM		BLU		RM		BLU	
	Pagu	Reali- sasi	Pagu	Reali- sasi	Pagu	Reali- sasi	Pagu	Reali- sasi
Universitas Riau	202.523	36.312	212.449	16.340	213.317	38.176	237.600	33.557
UIN Sultan Syarif Kasim Riau	173.400	17.019	122.601	5.312	171.153	16.145	125.708	7.132
Rumkit Bhayangkara Pekanbaru	5.097	772	15.188	-	5.122	808	21.364	3.655
<b>Total</b>	<b>381.020</b>	<b>54.103</b>	<b>350.238</b>	<b>21.652</b>	<b>389.592</b>	<b>55.129</b>	<b>384.672</b>	<b>44.344</b>

Sumber: SPAN (diolah)

Pagu belanja satuan kerja (Satker) BLU tahun 2017 turun, baik pagu belanja yang berasal dari Rupiah Murni (RM) maupun dari pendapatan BLU. Meskipun demikian porsi pagu belanja sumber dana BLU meningkat dari 47,90% menjadi 49,68% dari total pagu. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian BLU untuk membiayai kebutuhan belanjanya semakin baik. Lebih lanjut, realisasi belanja mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase untuk sumber dana BLU, yaitu dari 6,18% pada triwulan I 2017 menjadi 12,85% pada triwulan I tahun 2018.

### 4. Manajemen Investasi Pusat

Investasi pusat yang ada di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dalam bentuk kredit program. Piutang negara yang berstatus aktif tersebar di 5 debitur, yaitu empat debitur Pemerintah Daerah dan satu debitur BUMD. Namun, saat ini hanya terdapat dua debitur yang masih mempunyai hutang kepada pemerintah pusat dengan total sebesar Rp20,41 miliar, sedangkan sisanya telah melunasi hutangnya.

Sementara itu, kredit program yang ada di Provinsi Riau berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu modal kerja usaha kecil dan menengah guna meningkatkan kegiatan usahanya. Kredit program di Provinsi Riau pada akhir Maret 2018 telah disalurkan sejumlah Rp407,56 triliun dengan total debitur sebanyak 9.990 debitur, terbanyak skema KUR Kecil sebesar Rp226,28 miliar dan KUR Mikro Rp179,86 miliar. Kredit program terbanyak tersebar di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru masing-masing sebesar Rp51,76 miliar dan Rp43,67 miliar.

### C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan negara dan belanja negara yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2018 di lingkup Provinsi Riau menggunakan analisis *forecasting* dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Perkiraan pendapatan negara mempertimbangkan perkembangan perekonomian di dunia, maupun di Indonesia dan regional serta perkembangan tingkat inflasi terkini, sedangkan perkiraan belanja negara dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang tengah dilaksanakan pemerintah, seperti program prioritas nasional pemerintah, nawacita, dan gerakan efisiensi belanja.

Pendapatan negara hingga akhir tahun 2018 diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp14,47 triliun atau 80,66% dari estimasi pendapatan. Persentase perkiraan realisasi pendapatan meningkat dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang hanya mencapai 79,08%. Perkiraan kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berada di level 2,91% (y-on-y). Sementara itu, perkiraan belanja negara yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp28,41 triliun atau 95,50% dari pagu belanja. Persentase realisasi ini berada di atas realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar 76,19%.

Berikut disajikan perkiraan realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2018 di Provinsi Riau.

**Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau  
s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi
Pendapatan Negara	17.945	2.786	15,53	14.474	80,66
Belanja Negara	29.751	5.944	19,98	28.413	95,50
Surplus/Defisit	(11.806)	(1.640)	13,89	(13.939)	118,06

Sumber: SPAN dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Selain itu, APBD juga sangat berguna untuk mengetahui komposisi anggaran dan prioritas kegiatan suatu daerah. Secara agregat total APBD tahun anggaran 2018 di Provinsi Riau sebesar Rp30,83 triliun untuk target pendapatan, pagu belanja sebesar Rp27,51 triliun dan defisit sebesar Rp1,23 triliun.

**Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau  
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	<b>30.472,91</b>	<b>5.910,74</b>	<b>30.826,97</b>	<b>6.592,81</b>
PAD	<b>6.423,17</b>	<b>724,33</b>	<b>7.060,48</b>	<b>1.040,39</b>
Pajak Daerah	4.337,03	461,42	4.798,53	750,88
Retribusi Daerah	385,16	40,05	358,82	34,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	393,11	78,35	418,35	116,63
Lain-Lain PAD yang Sah	1.307,87	144,52	1.484,79	137,96
Pendapatan Transfer	<b>23.959,75</b>	<b>5.142,36</b>	<b>23.662,94</b>	<b>5.551,60</b>
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	<b>19.622,55</b>		<b>20.960,95</b>	<b>5.290,55</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	5.148,28	1.244,02	4.347,69	987,20
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.774,43	1.514,13	4.151,43	1.017,92
Dana Alokasi Umum	8.116,80	1.853,17	8.386,63	2.871,16
Dana Alokasi Khusus	2.583,04	531,04	4.075,19	414,26
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	<b>2.770,75</b>		<b>1.569,15</b>	<b>235,68</b>
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	--
Dana Penyesuaian	2.688,18	36,85	1.569,15	235,68
Transfer Pemerintah Provinsi	<b>1.078,79</b>		<b>1.101,28</b>	<b>25,37</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.078,79	6,46	1.101,28	25,37
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	<b>487,67</b>	-	<b>31,56</b>	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	487,67	-	31,56	-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<b>89,99</b>	<b>44,04</b>	<b>103,55</b>	<b>0,81</b>
Pendapatan Hibah	32,98	0,73	103,55	0,77
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	0,04
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>30.472,91</b>	<b>5.910,74</b>	<b>30.826,97</b>	<b>6.592,81</b>
<b>BELANJA</b>	<b>31.447,80</b>	<b>2.417,09</b>	<b>27.512,44</b>	<b>2.929,71</b>
Belanja Pegawai	11.918,32	1.511,81	10.783,77	1.739,89
Belanja Barang	8.023,24	610,42	8.538,02	844,54
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	42,67	-	32,31	-
Belanja Hibah	1.399,76	199,45	2.167,27	220,97

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial	76,11	-	77,87	-
Belanja Bantuan Keuangan	2.790,90	0,48	-	-
Belanja Modal	7.026,90	88,08	5.864,88	124,27
Belanja Tidak Terduga	169,89	0,38	48,30	0,04
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.665,42</b>	<b>6,46</b>	<b>4.540,89</b>	<b>50,74</b>
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	<b>1.427,03</b>	-	<b>1.555,07</b>	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.427,03	6,46	1.548,10	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	6,98	-
Transfer Bantuan Keuangan	<b>238,39</b>	-	<b>2.985,81</b>	<b>50,74</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	643,13	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	238,39	-	2.336,82	50,74
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	5,86	-
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>33.113,22</b>	<b>2.417,09</b>	<b>32.053,33</b>	<b>2.980,45</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(2.640,31)</b>	<b>3.493,65</b>	<b>(1.226,36)</b>	<b>3.311,11</b>

Sumber: BPKAD se-Provinsi Riau

Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau tahun 2018 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer, yaitu Rp23,66 triliun (76,76%), turun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi Rp23,96 triliun atau 78,62%. Selain itu, pagu belanja juga turun 12,51% dibanding tahun sebelumnya.

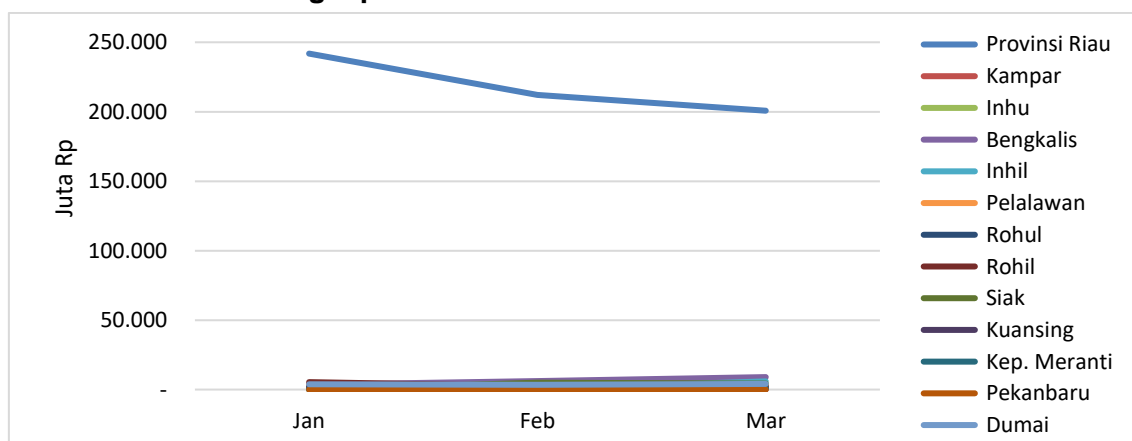
## A. Pendapatan Daerah

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp7,06 triliun yang berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp4,80 triliun atau 67,96%, retribusi daerah Rp358,82 miliar (5,08%), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp418,35 miliar (5,93%), dan lain-lain PAD yang sah Rp1,48 triliun (21,03%). Total realisasi PAD sebesar Rp1,04 triliun atau 14,74% dari total target.

#### a. Penerimaan Pajak Daerah

**Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018**



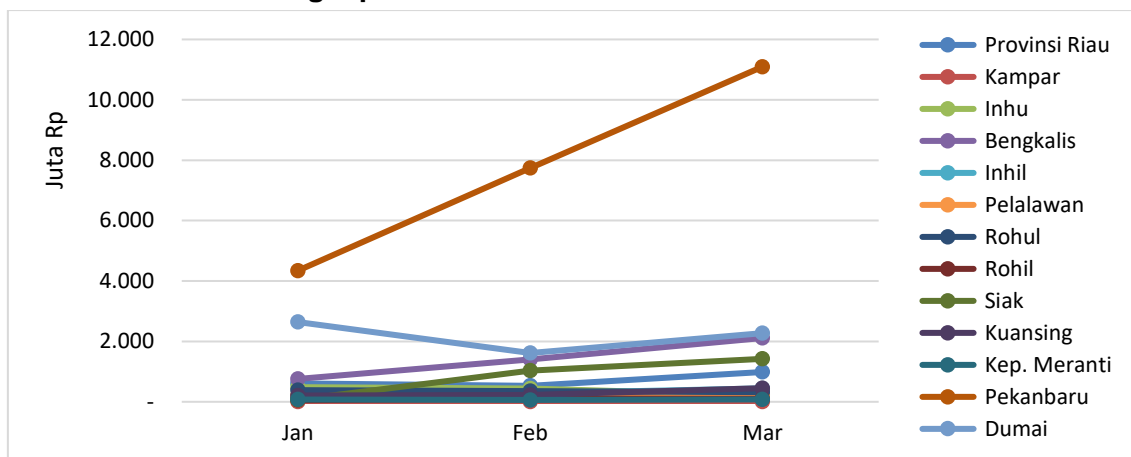
Sumber: BPKAD (diolah)



Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp750,88 miliar atau 15,65% dari target, didominasi oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp654,75 miliar, 87,20% dari total penerimaan pajak daerah diikuti Kabupaten Bengkalis sebesar Rp18,65 miliar (2,70%).

b. Penerimaan Retribusi Daerah

**Grafik Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018**

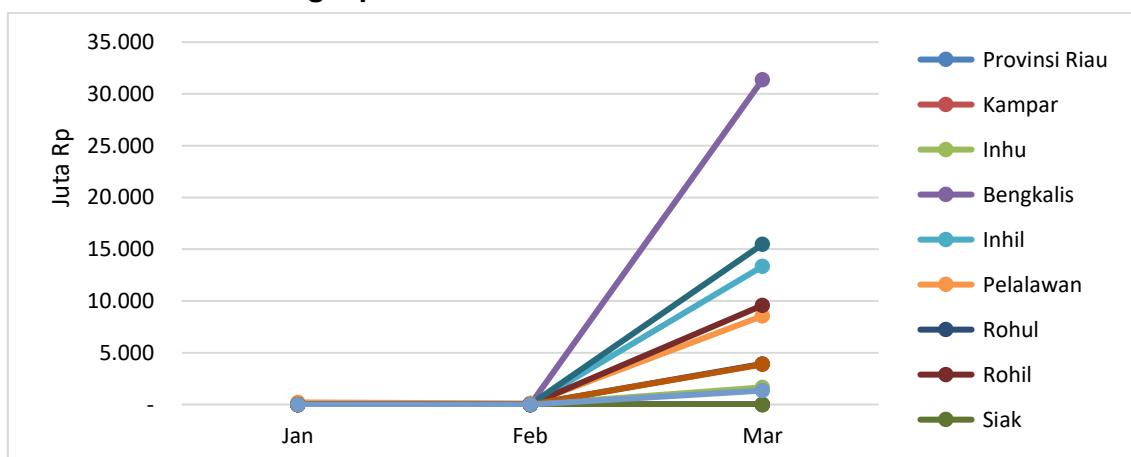


Sumber: BPKAD (diolah)

Penerimaan retribusi daerah direalisasikan Rp34,92 miliar atau 9,73% dari target penerimaan. Penerimaan terbesar berada di Kota Pekanbaru sebesar Rp11,10 miliar (31,77%), sebagian besar terjadi di bulan Maret dengan total Rp19,74 miliar (45,11%).

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

**Grafik Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018**

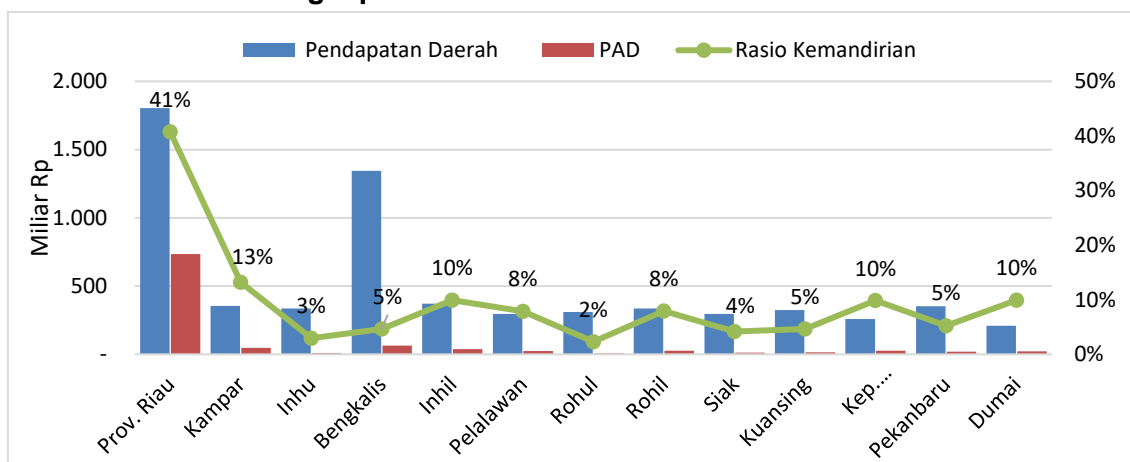


Sumber: BPKAD (diolah)

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp116,63 miliar (27,88%), terbesar berada di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp31,37 miliar atau 35,08%, diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp15,48 miliar. Sebagian besar penerimaan ini terealisasi di bulan Maret sebesar 99,66%.

Penerimaan PAD memberi kontribusi sebesar 15,78% dari total pendapatan daerah. Hal ini berarti rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (40,75%) dan terendah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,31%.

### Perbandingan Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018



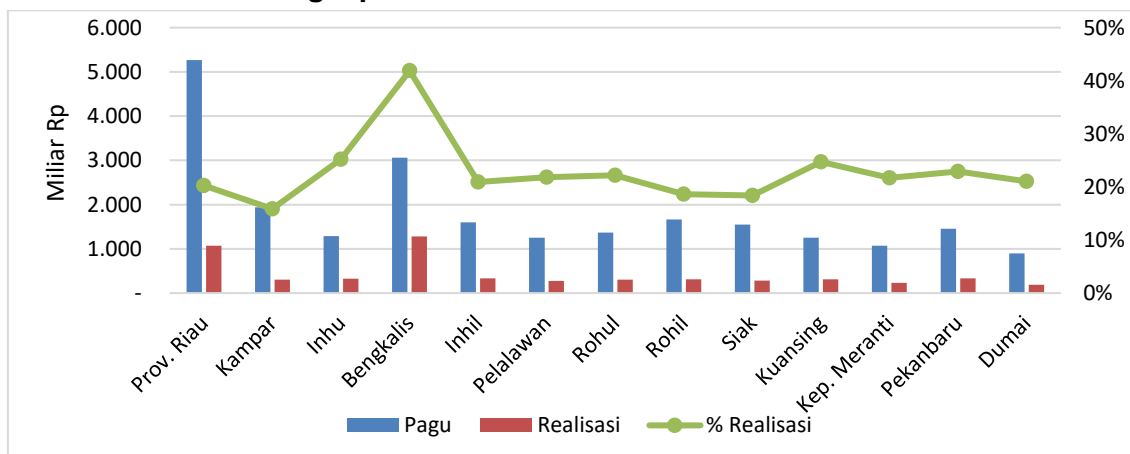
Sumber: BPKAD (diolah)

Pekanbaru.tribunnews.com. Pekanbaru – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau akhirnya menyetujui revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Poin penting perubahan Perda yakni tentang tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutama pada jenis Bahan Bakar Umum yaitu Pertalite yang awalnya 10% turun menjadi 5%, sehingga harga Pertalite di Provinsi Riau bisa bersaing dengan daerah lain.

## 2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer se-Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp23,66 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp5,55 triliun (23,46%). Realisasi pendapatan transfer terbesar berada di Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1,07 triliun atau 19,24% dari total realisasi pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp1,28 triliun (23,08%).

### Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018



Sumber: BPKAD (diolah)

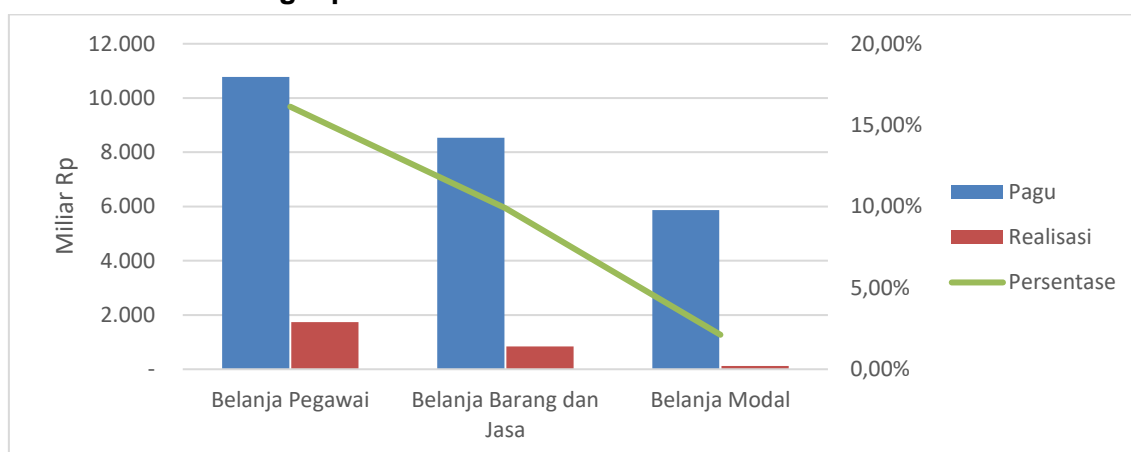
### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp103,55 miliar, hanya 0,34% dari total target pendapatan daerah. Target pendapatan ini semuanya berasal dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat. Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp810,42 juta atau hanya 0,78% dari target.

## B. Belanja Daerah

### 1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

**Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan I Tahun 2018**

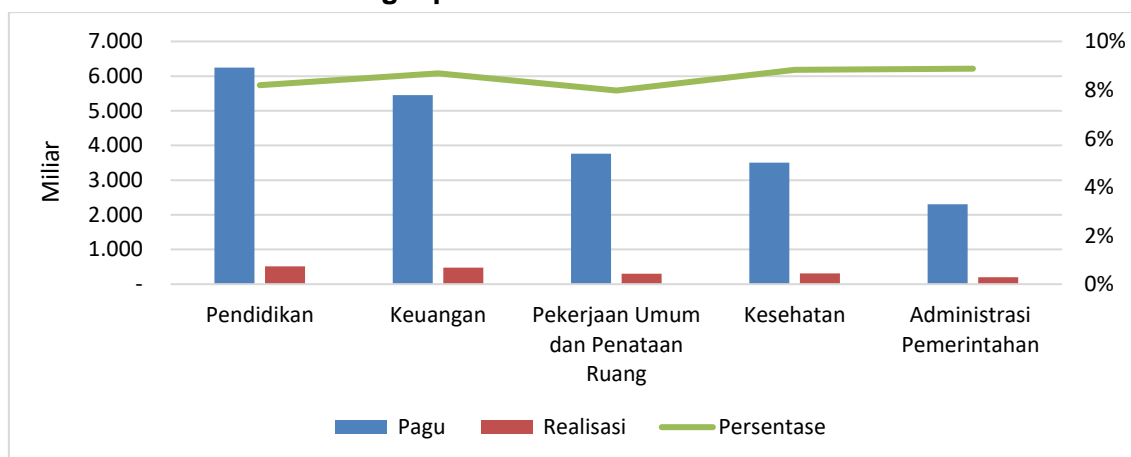


Sumber: BPKAD (diolah)

Belanja APBD terbesar adalah belanja pegawai dengan realisasi Rp1,74 triliun, 16,13% dari pagu belanja pegawai atau 64,23% dari total realisasi belanja, diikuti oleh belanja barang dengan realisasi Rp844,54 miliar (41,08% dari pagu belanja). Sementara itu, belanja modal hanya terealisasi Rp124,27 miliar atau 2,12% dari pagu belanja.

### 2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

**Grafik Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Riau Tahun 2018**



Sumber: BPKAD (diolah)

Pagu belanja daerah terbesar digunakan untuk urusan pendidikan, yaitu mencapai Rp6,24 triliun atau 22,67%. Hal ini berarti pemerintah daerah berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan pendidikan di daerahnya. Selain itu, pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan kesehatan juga menjadi prioritas utama daerah dengan menyediakan sarana prasarana umum dan kesehatan untuk masyarakat. Selain itu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang mendapatkan porsi belanja tertinggi adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan kesehatan yang masing-masing mendapatkan porsi Rp3,76 triliun dan Rp3,51 triliun.

Realisasi belanja per urusan digunakan untuk belanja urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan kesehatan masing-masing sebesar Rp512,01 miliar (8,20%), Rp300,10 miliar (8,84%), dan Rp309,99 miliar (7,98%).

### C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2018 diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp28,52 triliun atau 92,52% dari target pendapatan. Sementara itu, perkiraan belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp26,91 triliun atau 97,82% dari pagu belanja. Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai dengan akhir tahun 2018 di Provinsi Riau.

**Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau  
s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi
Pendapatan Daerah	30.826,97	6.592,81	21,39	28.521,73	92,52
Belanja Daerah	27.512,44	2.929,71	9,30	26.912,27	97,82
Surplus/Defisit	(1.226,36)	3.311,11	(294,56)	1.609,46	(131,24)

Sumber: BPKAD, diolah dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

#### IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

##### A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu.

**Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau  
s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)**

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>2.786.948</b>	<b>6.349.660</b>	<b>4.179.424</b>	<b>2,70%</b>	<b>4.069.507</b>
Pendapatan Perpajakan	2.572.703	747.354	3.320.057	4,67%	3.171.981
Pendapatan Bukan Pajak	214.245	463.310	677.554	(24,45%)	896.794
Hibah	-	768	768	4,92%	732
Transfer	-	5.138.228	181.045	-	-
<b>Belanja Negara</b>	<b>5.943.794</b>	<b>2.856.196</b>	<b>3.842.807</b>	<b>(2,02%)</b>	<b>3.922.050</b>
Belanja Pemerintah	986.610	2.805.458	3.792.068	(3,30%)	3.921.566
Transfer	4.957.183	50.739	50.739	10.381,10%	484
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(3.156.845)</b>	<b>3.493.463</b>	<b>336.617</b>	<b>128,28%</b>	<b>147.457</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>123.040</b>	<b>123.040</b>	<b>(90,99%)</b>	<b>1.366.195</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	123.040	123.040	(90,99%)	1.366.195
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
<b>Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>(3.156.845)</b>	<b>3.616.503</b>	<b>459.657</b>	<b>(69,63%)</b>	<b>1.513.652</b>

Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2018 dan 2017 Provinsi Riau

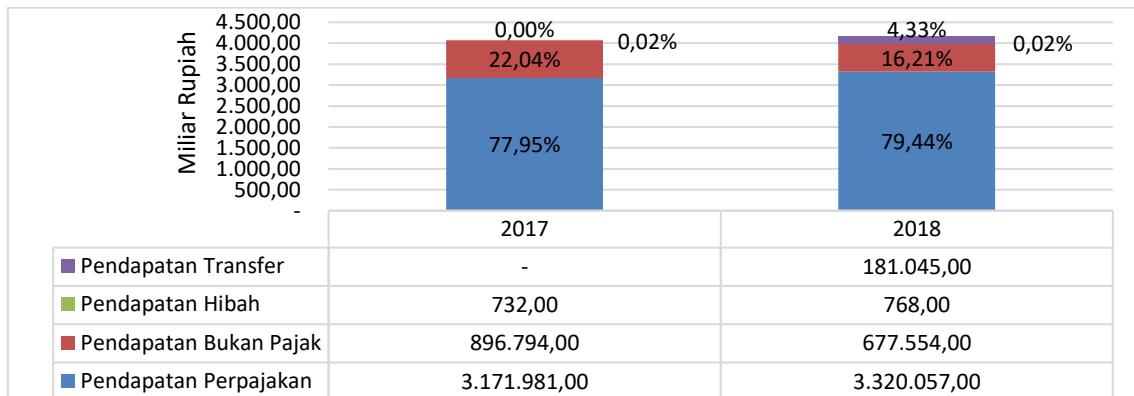
##### B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

###### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan I tahun 2018 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian, PNPB konsolidasian, pendapatan hibah konsolidasian, dan pendapatan transfer konsolidasian. Realisasi pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan 2,70% dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan pendapatan pajak yang menjadi penyumbang utama pendapatan konsolidasian mengalami peningkatan sebesar 4,67%.

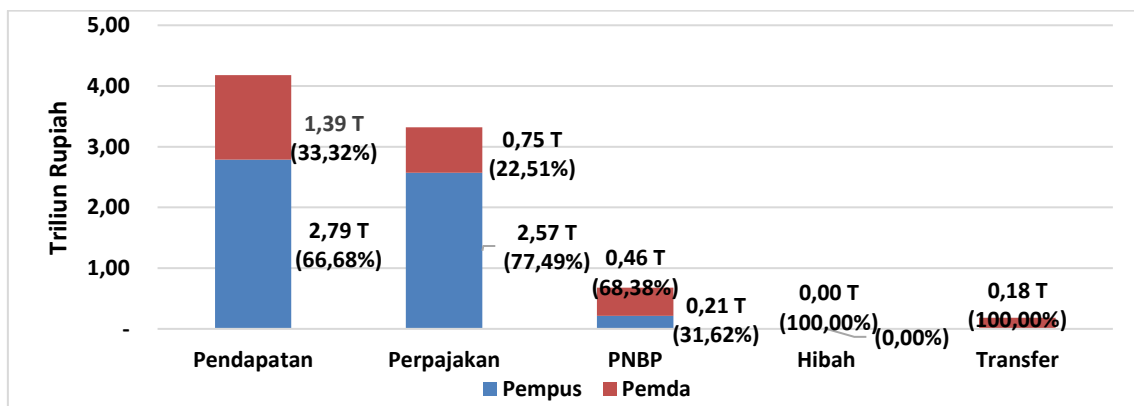
### Grafik Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2017



Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2018 dan 2017 Provinsi Riau (diolah)

Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian sebesar Rp3,32 triliun (79,44% dari total pendapatan), diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian Rp667,55 miliar (16,21%). Pendapatan perpajakan konsolidasian meningkat baik secara nominal maupun persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp3,17 triliun (77,95%).

### Grafik Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Riau s.d. Triwulan I Tahun 2018



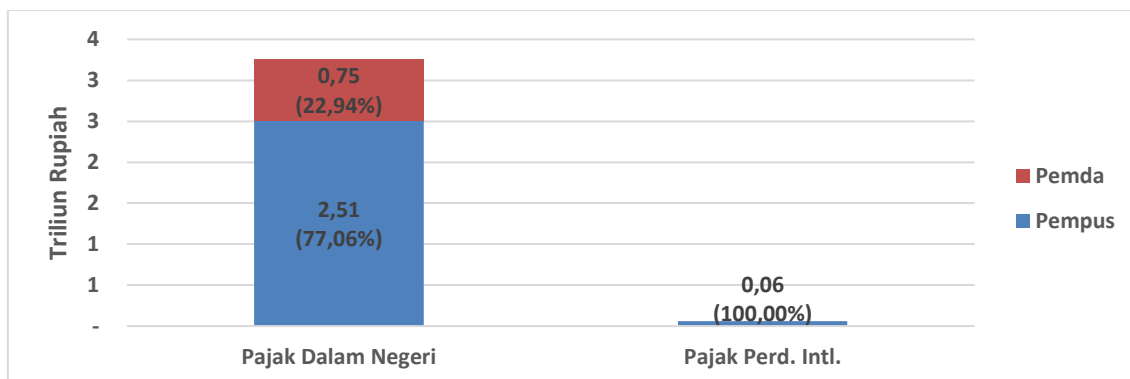
Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2018 Provinsi Riau (diolah)

Realisasi pendapatan konsolidasian berasal dari penerimaan pemerintah pusat sebesar Rp2,79 triliun atau 66,68% dan sebagian besar berasal dari pendapatan perpajakan yang mencapai Rp2,57 triliun. Sementara itu, pendapatan pemerintah daerah didominasi pendapatan perpajakan sebesar Rp747,35 miliar, diikuti pendapatan bukan pajak Rp463 miliar.

## 2. Analisis Perubahan

Realisasi pendapatan konsolidasian pada triwulan I tahun 2018 meningkat Rp109,92 miliar atau 2,70% yang didukung oleh peningkatan pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp148,08 miliar (4,67%) dibanding triwulan I tahun sebelumnya.

### Grafik Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian s.d. Triwulan I Tahun 2018



Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2018 Provinsi Riau (diolah)

Penerimaan perpajakan konsolidasian disumbang penerimaan pajak dalam negeri sebesar 98,14% yang berasal dari pemerintah pusat sebesar 77,06% dan sisanya 22,94% dari pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan pajak internasional hanya menyumbang Rp61,60 miliar atau hanya 1,86%.

### 3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

**Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2017 dan 2018**

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Pendapatan Perpajakan	3.171.980.975.476	9,11%	3.320.057.193.368	4,67%
PNBP	896.794.365.356	12,08%	677.554.281.718	(24,45%)
Hibah	732.000.000	-	768.000.000	4,92%
Transfer	-	-	181.044.678.468	-
Total	4.068.775.340.832	9,77%	4.179.424.153.554	2,70%
PDRB/Pert. Ekonomi	171.520.000.000.000	2,84	179.860.000.000.000	2,91

Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2018 dan 2017 Provinsi Riau (diolah)

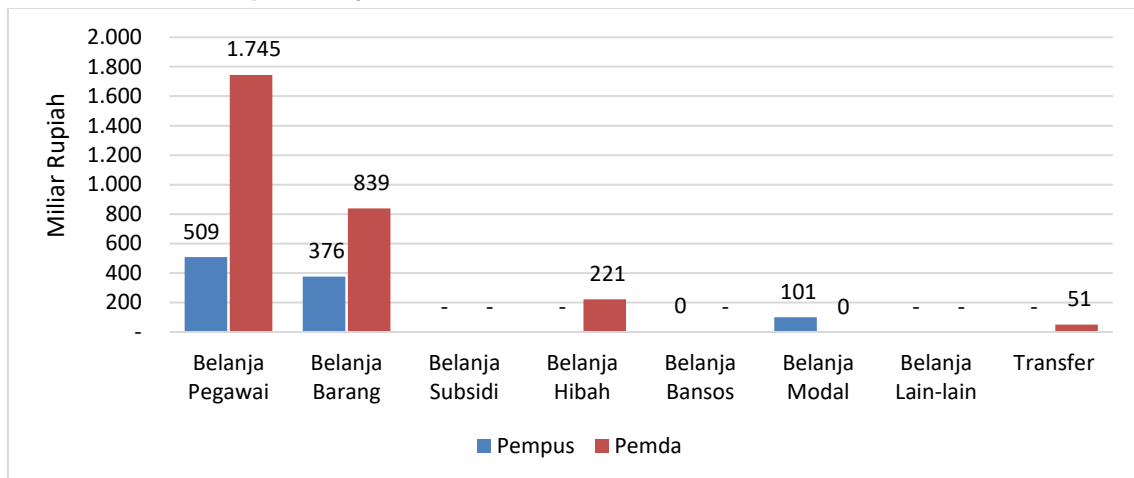
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan I tahun 2018 sebesar 2,91%. Pada periode yang sama, pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi Rp4,18 triliun atau naik 2,70%. Selisih angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan menunjukkan adanya potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang belum dioptimalkan oleh pemerintah. Namun secara umum pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian.

### C. Belanja Konsolidasian

Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal.

## 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

### Grafik Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Provinsi Riau TW I 2018



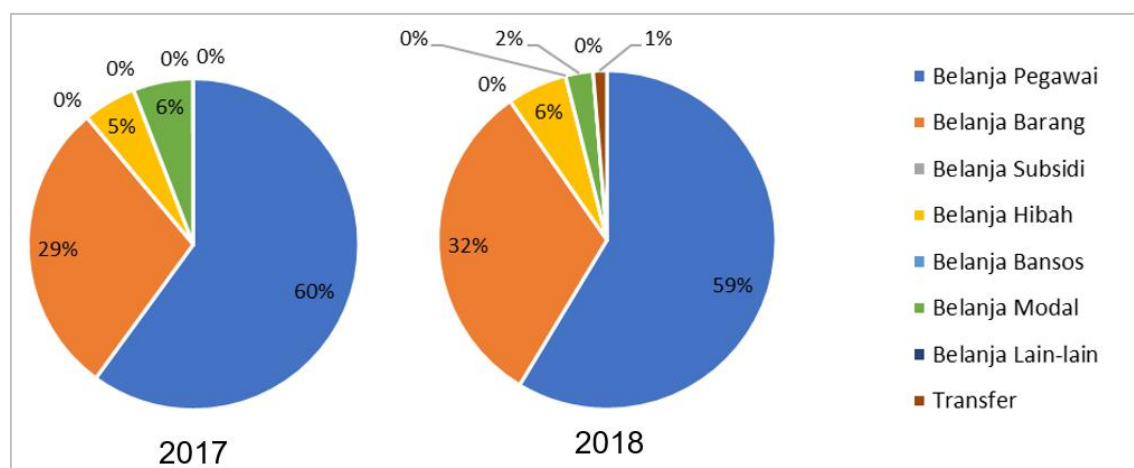
Sumber: LKPK Triwulan I 2018 Provinsi Riau (diolah)

Belanja Konsolidasian triwulan I tahun 2018 Provinsi Riau sebesar Rp3,79 triliun. Porsi terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai 58,65%, diikuti oleh belanja barang sebesar 31,64%, sedangkan belanja modal hanya mempunyai porsi 2,63%.

## 2. Analisis Perubahan

Belanja konsolidasian sebesar Rp3,79 triliun mengalami kontraksi 2,02% dibandingkan tahun 2017. Hal ini dipengaruhi penurunan sebagian besar jenis belanja.

### Grafik Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018



Sumber: LKPK Triwulan I 2017 dan 2018 Provinsi Riau diolah)

Komposisi belanja konsolidasian triwulan I 2018 berubah dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu. Pada 2018 porsi belanja barang dan belanja hibah masing-masing naik 10,06% dan 10,79%, sedangkan belanja pegawai, belanja modal, dan pembayaran bunga hutang mengalami penurunan yang cukup signifikan.



### 3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi perekonomian regional ke arah yang lebih baik. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian regional, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.

**Tabel Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2017 dan 2018**

Indikator Ekonomi Regional	2017	2018
Belanja Pemerintah (miliar rupiah)	3.922	3.842
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,84	2,91
Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB (%)	2,29	2,14
Tingkat Kemiskinan (%)	7,98	7,78
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,76	5,76
Indeks Pembangunan Manusia	71,20	71,79*

Sumber: LKPK Triwulan I 2018 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan belanja pemerintah dan kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB pada tahun 2018 tidak mempengaruhi perbaikan perekonomian regional. Hal ini ditandai dengan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan TPT, serta peningkatan IPM yang mengindikasikan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

### D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB

Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi pemerintah dan investasi. Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah untuk kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa, dan pengeluaran lainnya yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian.

**Tabel Laporan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018**

Uraian	Jumlah
Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto	
<b>Pendapatan:</b>	<b>7.925.943.578.999</b>
Pajak	2.571.571.290.671
Kontribusi Sosial	-
Hibah	5.138.995.853.708
Pendapatan Lainnya	215.376.434.620,0
<b>Beban:</b>	<b>6.944.780.515.622</b>
Kompensasi Pegawai	539.447.153.066
Penggunaan Barang dan Jasa	1.178.823.336.209

Uraian	Jumlah
Konsumsi Aset Tetap	-
Subsidi	-
Hibah	5.178.158.388.640
Manfaat Sosial	378.000.000
Beban Lainnya	47.973.637.707
<b>Keseimbangan Operasi Bruto/neto</b>	<b>981.163.063.377</b>
<b>Transaksi Aset Non Keuangan Neto</b>	<b>225.290.232.149</b>
Aset Tetap	206.808.731.981
Perubahan Persediaan	-
Aset Non Produksi	18.481.500.168
<b>Net Lending/Borrowing</b>	<b>755.872.831.228</b>
<b>Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban</b>	<b>163.499.524.902</b>
<b>Akuisisi Neto Aset Keuangan</b>	<b>163.499.524.902</b>
Dalam Negeri	163.499.524.902
Luar Negeri	-
<b>Keterjadian Kewajiban Neto</b>	<b>-</b>
Dalam Negeri	-
Luar Negeri	-

Sumber: LKPK Triwulan I 2018 Provinsi Riau (diolah)

Konsumsi pemerintah pada triwulan I tahun 2018 sebesar Rp1,72 triliun. Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 0,96% dari PDRB Provinsi Riau sebesar Rp179,86 triliun. Sementara itu, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah sebesar 0,11%. Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset tetap yang berjumlah Rp206,81 miliar.

Kontribusi pemerintah dari konsumsi pemerintah memberikan pengaruh jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi pemerintah berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dalam investasi. Hal ini sesuai dengan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang sedang melambat, sehingga konsumsi pemerintah lebih dibutuhkan untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian.

## V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

### A. Sektor Pariwisata Primadona Baru Riau

Saat ini sektor pariwisata nasional menyumbangkan devisa serta menyerap tenaga kerja yang signifikan bagi negara. Diperkirakan devisa tahun 2019 akan melampaui pemasukan dari industri kelapa sawit. Di Riau dengan berbagai potensi yang ada pariwisata sudah menjadi primadona baru. Kunjungan wisatawan mancanegara kini sudah di posisi nomor 2 se-Indonesia. Presiden Joko Widodo juga telah menempatkan pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan selain infrastruktur, maritim, pangan, dan energi. Pariwisata dijadikan *core economy* karena merupakan komoditas paling *sustainable* dan menyentuh ke level bawah masyarakat. Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengungkapkan pembangunan sebuah destinasi wisata harus diperhatikan 3A (atraksi, aksesibilitas, amninitas).

Sejak hari jadi Provinsi Riau ke-58 tahun 2015 lalu, Riau telah mengusung jargon “*Riau The Homeland of Melayu*,” yang disesuaikan dengan semangat daerah sebagai tanah tumpah darah Melayu yang bercirikan kebudayaan serta falsafah hidup. Hal ini menimbulkan optimisme bahwa kekayaan budaya yang dimiliki Riau dapat membantu mendorong sektor pariwisata berkembang. (dimuat di Harian Riau Pos - 30/01/2018).

### B. Riau di atas Minyak di bawah Minyak Tetapi Harga Minyak Mahal

Riau penghasil minyak dan gas, juga minyak nabati sawit. Sehingga kerap diidentikkan dengan daerah kaya, “di atas minyak di bawah minyak”. Namun nasibnya dibuat seperti ayam yang mati di lumbung padi. Penghasil migas terbesar di Indonesia tetapi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite-nya malah termahal di Indonesia.

Dari komunikasi awal Pertamina mengaku kepada DPRD Riau, kenaikan harga Pertalite merupakan kebijakan Pertamina tidak hanya untuk Riau dan Kepulauan Riau saja, namun berlaku seluruh Indonesia. Ternyata yang membedakannya adalah pajak daerah. Di Riau 10% sedang di daerah lain hanya 5-6%. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan, memang Riau itu terlalu tinggi pajaknya. Maka dari itu mereka berjanji agar perda itu dievaluasi dan direvisi.

Akhirnya pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap Raperda Tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sekaligus persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah menyetujui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi 5%. (dimuat di Harian Riau Pos - 16/03/2018).